

# Diplomasi Pertahanan Dan Militer Pemerintah Australia Dengan Pemerintah Myanmar Di Tengah Terjadinya Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Etnis Rohingya Tahun 2018

Patricia Gracia Amin Nino<sup>(1)</sup>, D.A Wiwik Dharmiasih<sup>(2)</sup>, Putu Titah Kawitri Resen<sup>(3)</sup>

<sup>1, 2, 3</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: [Patricia gracia16@gmail.com](mailto:Patricia gracia16@gmail.com) <sup>(1)</sup>, [wiwikd@unud.ac.id](mailto:wiwikd@unud.ac.id) <sup>(2)</sup>, [kawitriresen@gmail.com](mailto:kawitriresen@gmail.com) <sup>(3)</sup>

## ABSTRACT

*This research aims to explain how Australian defense diplomacy in the form of defense and military cooperation with the Government of Myanmar in the midst of human rights violations against the Rohingya Ethnic in 2018. Australia's defense and military cooperation aims to gain access to enter and communicate with the Government of Myanmar and provide advice in overcoming Rohingya Ethnic issues. The cooperation will take the form of humanitarian assistance, disaster relief and peace operations training or joint training. This research uses a descriptive qualitative method. The conceptual framework used is Defense Diplomacy. The conceptual framework used is Defense Diplomacy..*

**Keywords:** Australia, Myanmar, Defense Diplomacy

## 1. PENDAHULUAN

Diplomasi Pertahanan (*Defence Diplomacy*) merupakan konsep yang diperkenalkan pasca berakhirnya Perang Dingin (Drab, 2018). Menurut Cottey dan Forster (2004), Diplomasi Pertahanan adalah sebuah kerja sama yang melibatkan pasukan bersenjata pada masa damai sebagai alat kebijakan luar negeri. Diplomasi Pertahanan tidak melibatkan operasi militer, melainkan kegiatan pertahanan seperti adanya pergantian personel atau pertukaran personel, kunjungan pesawat militer dan kapal perang, adanya pertemuan antara pejabat senior dan kementerian pertahanan, pendidikan dan latihan, forum pertahanan regional, program bantuan, tindakan untuk membangun kepercayaan dan keamanan, serta kegiatan-

kegiatan untuk pengembangan senjata (Anwar, 2014).

Australia merupakan salah satu negara yang aktif melakukan Diplomasi Pertahanan. Salah satunya adalah dengan menjalin kerja sama pertahanan dan militer dengan Myanmar. Australia kembali membangun hubungan bilateral yang normal dengan Myanmar pada tahun 2013 (Hill, 2017). Normalisasi hubungan tersebut terjadi setelah sebelumnya Australia sempat memberikan sanksi keuangan, sanksi perjalanan dan melakukan embargo senjata terhadap Myanmar karena pemerintahan yang dikuasai oleh militer serta rezim yang otoriter (Mutiarra, 2005). Normalisasi hubungan tersebut ditandai dengan dilakukannya kembali kerja sama di bidang pertahanan dan militer dengan Myanmar, setelah Pemerintah Australia melihat

reformasi Myanmar menjadi negara yang lebih demokratis (Reuters, 2012). Bentuk kerja sama pertahanan dan militer yang dilakukan berupa pemberian bantuan dana, bantuan kemanusiaan, bantuan bencana, pelatihan pemeliharaan perdamaian, pelatihan Bahasa Inggris, dan pemberian pelatihan terhadap petugas (Australian Government Department of Defence, 2017).

Namun pada tahun 2017, militer Myanmar melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap Etnis Rohingya. Pada 25 Agustus 2017, pasukan keamanan dan militer Myanmar menyerang dan melakukan pembersihan terhadap Etnis Rohingya di Negara Bagian Rakhine (Human Rights Watch, 2017). Operasi pembersihan tersebut dilakukan dengan berbagai tindakan kekerasan seperti pemerkosaan terhadap anak perempuan dan ibu-ibu, pembakaran rumah-rumah dan desa tempat Etnis Rohingya tinggal, penyiksaan, pemukulan dan pembunuhan (CNN Indonesia, 2018). Sejak akhir Agustus 2017, lebih dari 671.000 orang Muslim Rohingya telah melarikan diri dari Negara Bagian Rakhine untuk menghindari penyerangan dan pembersihan etnis dalam skala besar oleh militer Myanmar (Asmardika, 2018). Selain itu terhitung sejak 25 Agustus hingga 24 September terdapat kira-kira 9.000 orang Muslim Rohingya meninggal dunia dalam penyerangan dan pembersihan yang dilakukan oleh militer Myanmar (BBC, 2017).

Kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan Myanmar mendapat banyak respon dari dunia internasional, seperti PBB dan *Amnesty International*, yang meminta negara-negara untuk segera memutuskan atau

menanggukuhkan segala bentuk kerja sama pertahanan dan militer serta pemberian bantuan militer (Parliament of Australia, 2018). PBB melalui Sekretaris Jendralnya, Antonio Guterres, menyatakan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh Pemerintah Myanmar merupakan bentuk pembersihan etnis dan menghimbau Pemerintah Myanmar untuk menghentikan segala bentuk pelanggaran dan kekerasan yang mereka lakukan terhadap Etnis Rohingya (BBC, 2017). Amnesty Internasional mengecam dan mengutuk semua tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Myanmar dan menyerukan agar menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap Etnis Rohingya. Amnesty Internasional bahkan mencabut penghargaan yang sebelumnya diberikan kepada pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi (NBC News, 2018). *Amnesty International* (2017) juga memberikan perhatiannya kepada negara-negara yang memiliki hubungan langsung dengan departemen pertahanan dan militer Myanmar dan menyerukan kepada mereka yang memiliki hubungan militer dengan Angkatan Darat Myanmar untuk menekan dan menghentikan pelanggaran yang dilakukan; dan mereka yang memberikan pelatihan militer untuk segera menanggukuhkan kerja sama.

Sementara itu terdapat beberapa negara, seperti Amerika Serikat dan Kanada yang memberikan sanksi terhadap militer Myanmar pada Desember 2017 dan Februari 2018 (New York Times, 2018). Inggris dan Perancis yang masih memiliki pelatihan bersama dengan militer Myanmar juga memutuskan untuk menanggukuhkan kerja sama dengan Pemerintah Myanmar (BBC, 2017). Uni Eropa bahkan telah

memberikan sanksi, melakukan embargo senjata dan melarang pelatihan atau kerja sama dengan angkatan bersenjata Myanmar (Uli, 2018). Berbeda dengan negara-negara lain yang memberikan sanksi dan melakukan embargo, Pemerintah Australia memutuskan untuk tetap melanjutkan kerja sama militer yang dijalin dengan Myanmar (ABC News, 2017) dan bahkan tidak menghiraukan tuntutan dari *Amnesty International*. Australia tetap memberikan bantuan dana hampir sebesar 400.000 AUD untuk pembelajaran Bahasa Inggris bagi militer Myanmar. Selain itu Pemerintah Australia juga menghadiri acara dan kursus pelatihan untuk anggota militer tersebut (Roy, 2018).

Pemerintah Australia mengatakan bahwa setiap negara memiliki keputusannya sendiri untuk menanggapi kasus kekerasan yang terjadi terhadap Etnis Rohingya, dan Pemerintah Australia memutuskan untuk tidak menanggukkan kerja sama dan tetap melanjutkan kerja sama. Selain itu Pemerintah Australia juga menganggap bahwa kerja sama yang mereka jalin dengan Myanmar bertujuan untuk mempromosikan profesionalisme dan kepatuhan terhadap hukum internasional (Parliament of Australia, 2017). Kerja sama tersebut hanya terjadi di daerah-daerah non-tempur dengan berfokus pada pemberian bantuan kemanusiaan, bantuan bencana, pelatihan pemeliharaan perdamaian dan pelatihan Bahasa Inggris (Elise Thomas, 2018). Selain itu, pejabat senior militer Australia dapat menyampaikan secara langsung kekhawatiran terkait kondisi Etnis Rohingya dan keadaan di Rakhine dengan pemimpin militer Myanmar.

## **Rumusan Masalah**

Penelitian ini kemudian merumuskan masalah, Diplomasi Pertahanan Pemerintah Australia dengan Pemerintah Myanmar di tengah pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap Etnis Rohingya di tahun 2018.

## **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana Diplomasi Pertahanan Pemerintah Australia dengan Pemerintah Myanmar di tengah pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap Etnis Rohingya di tahun 2018.

## **2. KAJIAN PUSTAKA**

### **Konsep Diplomasi Pertahanan**

Konsep Diplomasi Pertahanan merupakan suatu konsep yang mulai banyak dipakai pada pertengahan tahun 1990-an dan merupakan sebuah konsep yang relatif baru. Istilah Diplomasi Pertahanan pertama kali dibentuk setelah berakhirnya Perang Dingin, dengan didorong oleh kebutuhan politik untuk menciptakan lingkungan yang damai (Drab, 2018). Diplomasi Pertahanan umumnya mengacu pada diplomasi untuk membangun kepercayaan dalam pengembangan angkatan bersenjata secara demokratis dalam bentuk kerja sama pertahanan dan militer dan pemberian bantuan pada angkatan bersenjata yang demokratis serta berkontribusi untuk atau sebagai alat kebijakan luar negeri untuk menuhi kepentingan nasionalnya, serta untuk pencegahan dan penyelesaian konflik (Cotter dan Fortser, 2004). Berbeda dengan keterlibatan militer pada umumnya yang identik dengan

paksaan dan kekerasan, Diplomasi Pertahanan lebih bersifat non-koersif atau tanpa melibatkan kekerasan dan paksaan. Selain itu sifat Diplomasi Pertahanan yang didasari pada transparansi, reputasi dan integritas serta menggunakan metode tanpa kekerasan dan paksaan seperti membujuk bernegosiasi dapat mengubah eskalasi konflik (Blake, 2016). Pada umumnya Diplomasi Pertahanan tidak mencakup operasi militer, melainkan berbagai kegiatan pertahanan seperti pertukaran personel, kunjungan dan pertemuan dari pejabat senior Kementerian Pertahanan negara, pertemuan bilateral antara staf Kementerian Pertahanan, adanya pemberian latihan dan pendidikan, program bantuan, tindakan untuk membangun kepercayaan dan keamanan, dan kegiatan tentang pembatasan pengembangan senjata (Anwar, 2014).

Diplomasi Pertahanan memiliki beberapa peran dan tujuan dalam pengaplikasiannya. Tujuan dari Diplomasi Pertahanan adalah untuk membangun dan mempertahankan kepercayaan terhadap pengembangan angkatan bersenjata (Lech Drab, 2018). Menurut Andrew Cottey dan Anthony Forste (2004) Diplomasi Pertahanan dalam bentuk kerja sama militer dapat melakukan peran utama politik khususnya untuk membangun kerja sama yang lebih luas dan membangun rasa saling percaya satu sama lain dan juga dapat menjadi sarana untuk membangun atau memperkuat kepentingan bersama menuju lingkungan yang damai. Diplomasi Pertahanan dalam bentuk kerja sama militer juga berperan penting mengubah pola pikir militer negara lain khususnya untuk negara-negara yang memiliki

rezim militer yang otoriter dan menggunakan militer untuk kekerasan dalam menyelesaikan konflik (Cottey and Forster, 2004). Diplomasi Pertahanan dalam bentuk kerja sama pertahanan dan militer dapat mendukung reformasi dari pertahanan negara mitra. Selain itu Diplomasi Pertahanan juga dapat meningkatkan hubungan dengan musuh lama atau potensial, mempromosikan hubungan sipil-militer dan reformasi sektor keamanan, membantu pasukan pertahanan untuk berubah setelah terjadinya konflik atau perubahan politik, dan mendukung inisiatif pemeliharaan perdamaian regional (Drab, 2018).

### **3. METODE PENELITIAN**

Adapun metode penelitian yang peneliti gunakan yaitu dengan metode penelitian kualitatif eksplanatif. Penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana Diplomasi Pertahanan Pemerintah Australia dengan Pemerintah Myanmar di tengah pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap Etnis Rohingya di tahun 2018.

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Sumber data sekunder merupakan data yang tidak secara langsung dimiliki oleh peneliti. Data sekunder umumnya berupa literatur, penelitian terdahulu, buku dan laporan-laporan. Peneliti mengumpulkan data dari literatur yang berupa jurnal-jurnal yang digunakan sebagai informasi

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Diplomasi Pertahanan Australia**

Diplomasi Pertahanan marak digunakan oleh negara pada tahun 1990an (Baldino, 2016).

Diplomasi Pertahanan oleh negara digunakan untuk tujuan yang berbeda-beda, seperti membangun hubungan yang normal dengan negara yang pernah diajak bermusuhan, membangun aliansi, dan mencegah konflik. Australia menjadi salah satu negara yang melakukan dan menggunakan Diplomasi Pertahanan. Segala bentuk dan tujuan Diplomasi Pertahanan Australia dalam bentuk kerja sama pertahanan dan militer tercantum dalam *Defense White Paper* Australia (2013). Australia adalah salah satu negara yang menggunakan Diplomasi Pertahanan. Australia merupakan negara yang dipandang sebagai kekuatan menengah yang memiliki ambisi dengan militer dan birokrasi yang profesional (Baldino, 2016). Dengan kekuatan menengah yang dimilikinya, Australia tertarik membangun kemitraan untuk stabilitas keamanan. Australia pertama kali menggunakan Diplomasi Pertahanan dalam bentuk kerja sama pertahanan dan militer untuk membangun rasa saling menghormati, membangun kepercayaan dan memperluas kerja sama pertahanan dan militer intra regional, sebagai alat dan strategi penting untuk mempromosikan pengaruh kekuatan menengah yang dimiliki, membangun dan mendorong pemeliharaan perdamaian, operasi koalisi, dan mendukung keamanan global yang stabil dan untuk memenuhi kepentingan nasional Australia (Baldino, 2016).

Diplomasi Pertahanan Australia berfokus pada wilayah Asia Tenggara dan Asia pasifik seperti yang tercantum dalam *Australia Defense White Paper* (2013) yang menyebutkan bahwa segala bentuk ikatan pertahanan berfokus pada negara-negara tetangga atau regional. Diplomasi Pertahanan menjadi pilihan para

pembuat kebijakan Australia karena merupakan praktik dengan risiko yang rendah dan mampu mengurangi perselisihan (Baldino, 2018). Australia telah melakukan Diplomasi Pertahanan sejak tahun 1960an dan 1970an. Ketika itu Australia menggunakan program kerja sama pertahanan untuk mempromosikan kemampuan pertahanan lokal, mendukung akses Australia dan Kementerian Pertahanan ke pemerintahan daerah, meningkatkan intelijen Australia di bidang-bidang penting di perencanaan dan pertahanan regional yang kemudian tercantum dalam *Strategic Basis of Australian Defence* tahun 1975 (Raymond, 2018). Fokus dari Diplomasi Pertahanannya ada negara-negara tetangga atau negara-negara di kawasan regionalnya. Diplomasi Pertahanan yang dilakukan adalah dalam bentuk kerja sama pertahanan seperti memberikan pelatihan bahasa kepada pasukan Malaysia di Australia pada tahun 1963, kerja sama dalam hal penyediaan peralatan militer dengan Singapura di tahun yang sama, pelatihan pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Australia pada tahun 1968, dan kerja sama dengan Filipina untuk pelatihan pasukan bersama dan pertukaran personel pada tahun 1973 (Raymond, 2018).

Pada tahun 1980 Australia terus menggunakan Diplomasi Pertahanan. Bentuk Diplomasi Pertahanan yang dilakukan adalah pemberian bantuan pertahanan dalam jumlah yang cukup banyak kepada negara-negara di Asia Tenggara dan negara-negara Pasifik Barat Daya. Salah satu Diplomasi Pertahanan Australia tercermin pada program yang bernama *Australia Pacific Patrol Boat Program* yang dibuat oleh Pemerintah Australia pada tahun 1983 (Baldino,

2016). *Australia Pacific Patrol Boat Program* merupakan program yang dibuat Pemerintah Australia dengan menyediakan kapal patroli untuk negara-negara Asia Pasifik untuk membantu menjaga wilayah perairan dan lautan beserta sumber daya yang ada di dalamnya (Nautilus, 2009). Australia menyediakan sekitar 22 kapal patroli ke 12 negara Pasifik dari tahun 1987. Pada tahun 1990 antusiasme Australia terhadap Diplomasi Pertahanan semakin bertambah. Hal itu tercermin dalam kasus krisis Timor Timur yang terjadi pada tahun 1999. Pertahanan yang Australia lakukan adalah dengan mengirim pasukan perdamaian yang bernama pasukan *INTERFET*. Pada tahun 2000an Diplomasi Pertahanan yang dilakukan oleh Australia lebih mengarah pada bantuan kemanusiaan dan pelatihan bersama dengan mensponsori negara-negara tersebut untuk melakukan pelatihan penanggulangan bencana. Salah satu contohnya adalah melalui *Operation Pacific Partnership* atau Operasi Kemitraan Pasifik yang berlangsung pada tahun 2006 (Baldino, 2016).

Program Diplomasi Pertahanan (2013) Australia dalam bentuk kerja sama pertahanan dan militer dengan negara lain tercantum dalam *Australian Defense Cooperation Program* atau DCP. Adapun beberapa Program Diplomasi Pertahanan Australia yakni: membangun hubungan bilateral yang melibatkan pejabat senior dan pasukan ADF dan pertukaran pasukan, program pendidikan dan pelatihan formal oleh pejabat militer, bantuan kemanusiaan dan bencana alam, kunjungan kapal dan pelatihan militer bersama, penyediaan dana bantuan dan penasihat serta operasi intervensi

(Blaxland, 2015; Floyd, 2010). Pemberian pendidikan dan pelatihan formal oleh pejabat militer merupakan salah satu program Diplomasi Pertahanan yang dilakukan oleh Pemerintah Australia. Program pendidikan dan pelatihan formal ini diperuntukkan bagi siswa-siswa asing atau pasukan pertahanan dari negara lain untuk melakukan pendidikan dan pelatihan di Australia (Bateman, et.al., 2013). Diplomasi Pertahanan Australia juga dalam bentuk bantuan kemanusiaan dan bantuan penanggulangan bencana alam yang dikoordinasikan dan disediakan oleh Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (*Department of Foreign Affairs and Trade/ DFAT*) (Royal Australian Air Force, 2020). Pasukan pertahanan khususnya untuk Angkatan Udara Australia, jika terjadi bencana dapat membantu mengangkut bantuan kemanusiaan berupa bantuan logistik dan juga mengangkut personel, serta peralatan khusus untuk bencana alam (Royal Australian Air Force, 2020). Australia juga mengirim kapal-kapal yang digunakan untuk mengirim bantuan medis dan logistik seperti Kapal Amfibi Australia, HMAS Canberra, Adelaide dan Choules (Bergin, 2018). Australia juga kerap melakukan pelatihan militer bersama dengan negara-negara yang diajak bekerja sama sebagai bentuk Diplomasi Pertahanan. Hal ini dirancang dan dilakukan untuk menumbuhkan rasa pengertian satu sama lain dan juga membangun kepercayaan satu sama lain (Blaxland, 2015). Australia memiliki *Defense International Training Centre* yang merupakan kontributor utama bagi program kerja sama pertahanan dan pelatihan bilateral lainnya. Selain itu Australia juga kerap melakukan pelatihan militer bersama dengan negara-negara

yang diajak bekerja sama sebagai bentuk Diplomasi Pertahanan. Hal ini dirancang dan dilakukan untuk menumbuhkan rasa pengertian satu sama lain dan juga membangun kepercayaan satu sama lain (Blaxland, 2015). Selain itu Australia memiliki *Australian Defense Force Peace Operations Training Centre* yang berguna untuk memberikan pembelajaran dan mempersiapkan personel Australia dan pasukan internasional untuk pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan operasi perdamaian (Department of Defense, 2020).

### **Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Etnis Rohingya dan Kecaman Dunia Internasional**

Etnis Rohingya merupakan salah satu etnis Muslim minoritas yang berada di Myanmar. Etnis Rohingya pada umumnya berbeda dengan orang-orang Buddhis Myanmar yang dominan secara etnis, bahasa, dan agama (Chatzky, 2020). Masyarakat Muslim Etnis Rohingya merupakan keturunan pedagang Persia dan Arab serta kelompok lain yang telah lama berada di Myanmar selama beberapa generasi (BBC, 2017). Etnis Rohingya mayoritas beragama Muslim dan berbicara Bahasa Rohingya atau Ruingga, yang mana bahasa tersebut berbeda dengan yang dipergunakan oleh komunitas Buddhis atau masyarakat asli Myanmar (Aljazeera, 2018). Perlakuan diskriminatif yang dialami Etnis Rohingya di Myanmar telah terjadi sejak lama. Gelombang Kekerasan terjadi terhadap Etnis Rohingya pada tahun 2012 dengan skala yang cukup besar (Human Rights Watch, 2013). Kekerasan tersebut dilatarbelakangi oleh kasus pemerkosaan dan pembunuhan yang diduga dilakukan oleh

pemuda Muslim terhadap perempuan asli Myanmar (Crichton, 2013). Ketika itu, pasukan keamanan dan militer Myanmar kembali datang ke Negara Bagian Rakhine dan melakukan berbagai kekerasan terhadap masyarakat etnis Rohingya. Ketika itu Militer Myanmar melakukan penyiksaan, pembakaran terhadap rumah-rumah Etnis Rohingya, penghancuran masjid, penangkapan massal dengan menggunakan kekerasan dan juga memblokir akses bantuan untuk Etnis Rohingya (Siba and Qumori'ah, 2018). Gelombang kekerasan dengan skala yang cukup besar terhadap Etnis Rohingya kembali terjadi pada tahun 2016. Kekerasan saat itu dilatarbelakangi oleh terbunuhnya sembilan polisi perbatasan Myanmar yang dilakukan oleh Pasukan ARSA (Aljazeera, 2017). Militer Myanmar kembali datang ke Rakhine dan melakukan berbagai macam bentuk kekerasan seperti pemerkosaan terhadap perempuan yang diakhiri dengan pembunuhan, pemukulan dan penyiksaan, pembakaran terhadap rumah-rumah Etnis Rohingya dan pembakaran rumah-rumah ibadah (Perlez and Moe, 2016).

Pada Agustus 2017, gelombang kekerasan dengan skala yang lebih besar kembali terjadi terhadap Etnis Rohingya. Gelombang kekerasan yang dialami Etnis Rohingya pada Agustus 2017 memakan korban yang tidak sedikit, baik korban tewas ataupun korban yang terpaksa melarikan diri dari Negara Bagian Rakhine dan menyeberangi perbatasan, bahkan tidak sedikit pula Etnis Rohingya yang hidup terkatung-katung di perbatasan (Rasyid, 2018). PBB menyebutkan bahwa 1.000 orang telah terbunuh sejak dilakukannya operasi pembasmian pada Agustus 2017 (Ratcliffe,

2017). PBB juga menambahkan bahwa Etnis Rohingya yang melarikan diri berkisar 410.000 orang bahkan lebih, karena sebagian dari mereka tenggelam saat menyeberangi perbatasan.

Kekerasan yang terjadi pada Etnis Rohingya tentu saja menimbulkan berbagai macam reaksi dari dunia internasional. Salah satunya PBB dan Amnesty internasional yang mengecam dan mengutuk tindakan Pemerintah Myanmar (United Nations News, 2017; Amnesty Internasional, 2017). Beberapa negara yang langsung memberikan Reaksi seperti memberika sanksi dan juga embargo senjata seperti Uni Eropa, Canada, dan Amerika Serikat (Human Rights Watch, 2018; Kine, 2020). Selain itu terdapat Inggris dan juga Prancis yang memutuskan untuk menanggukkan kerja sama pertahanan yang sedang dijalin dengan Pemerintah Myanmar (Hussein, 2017).

Sementara itu, Australia memutuskan hal yang berbeda. Australia yang masih memiliki kerja sama pertahanan dengan Pemerintah Myanmar, Australia menolak untuk memutuskan hubungan pertahanannya dengan Myanmar. Pemerintah Australia berargumen bahwa keterlibatan mereka dapat meningkatkan pengaruh dan membantu Myanmar menuju demokrasi serta mendidik perwira senior Militer Myanmar (Dohery, 2018). Selain itu, Pemerintah Australia juga mengatakan bahwa kerja sama dengan Militer Myanmar bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dan kepatuhan terhadap hukum internasional

### **Diplomasi Pertahanan Pemerintah Australia Dengan Pemerintah Myanmar**

Pemerintah Australia dengan Pemerintah Myanmar telah memiliki hubungan diplomatik sejak tahun 1952 (Department of Foreign Affairs and Trade, 2020). Semenjak membangun hubungan diplomatik, Pemerintah Australia dengan Pemerintah Myanmar terus membangun hubungan bilateral yang baik satu sama lain, salah satunya di bidang militer dan pertahanan. Pada tahun 1952 Menteri Luar Negeri Australia saat itu, Casey, mengusulkan untuk membuat atase layanan di Myanmar yang kemudian direalisasikan tahun 1955 (Department of Defense, 2020). Pembukaan atase pertahanan Australia di Myanmar menjadi awal hubungan bilateral yang baik dalam bidang pertahanan dan militer antara kedua negara seperti adanya kunjungan pertahanan antara kedua negara, pelatihan bersama, latihan pemeliharaan perdamaian, pemberian pelatihan dan pendidikan kepada pasukan Myanmar (Selth, 1992).

Hubungan kedua negara dalam bidang pertahanan dan militer berjalan baik hingga kudeta militer yang dipimpin oleh Jenderal Ne Win terjadi pada tahun 1982. Kudeta militer yang dilakukan Jenderal Ne Win tersebut membuat hubungan pertahanan Australia dengan Myanmar menjadi renggang (Lowly Institute, 2013). Hal ini terjadi karena Jenderal Ne Win membuat pemerintahan Myanmar menjadi pemerintahan yang dikuasai oleh rezim militer yang otoriter dengan kebijakan isolasi (The Jakarta Post, ). Merenggangnya hubungan kedua negara menyebabkan semua kerja sama pertahanan dan militer serta Pelatihan bersama dan antara Australia dengan Myanmar kemudian perlahan-lahan dihentikan. Bahkan pada tahun



1979 Atase Australia untuk Myanmar ditarik kembali dan permintaan alat kepada Australia juga dihentikan (Selth, 1992). Pada tahun 1988, hubungan Pemerintah Australia dan Pemerintah Myanmar semakin memburuk. Hal ini terjadi karena Pemerintah Australia ikut bergabung dengan negara-negara Barat untuk mengisolasi dan menghukum rezim militer Myanmar karena menembak mati 3.000 orang yang melakukan demonstrasi mendukung kemerdekaan demokrasi (Lowy Institute, 2013). Pemerintah Australia merespon tindakan tersebut dengan memberlakukan beberapa sanksi seperti pembatasan visa untuk beberapa pejabat senior Myanmar dan juga melarang ekspor di bidang pertahanan sejak tahun 1988 (Reuters, 2009).

Hubungan Pemerintah Australia dengan Pemerintah Myanmar berangsur membaik pada akhir 2011 ketika Myanmar yang saat itu dipimpin oleh Presiden Thein Sein mulai melakukan reformasi dan perubahan di bidang politik, ekonomi, dan sosial (Lowy Institute, 2013). Pemerintah Australia yang melihat perubahan dan reformasi yang terjadi di Myanmar dan kemudian memutuskan untuk kembali membangun dan memulihkan hubungan dengan Pemerintah Myanmar. Pemerintah Australia kemudian bergerak cepat dengan melakukan kunjungan dengan mengirimkan Menteri Luar Negeri Australia ke Myanmar tahun 2011 untuk pertama kalinya dalam kurun waktu sepuluh tahun (Parliament of Australia, 2012). Pembicaraan untuk melakukan perbaikan hubungan militer dan pertahanan antara Pemerintah Australia dengan Pemerintah Myanmar pertama kali dilakukan pada Desember 2012 dengan adanya kunjungan pejabat untuk

membahas kerja sama bilateral di bidang militer dan pertahanan dan juga pembentukan program kerja sama pertahanan untuk tahun 2013/2014.

Pertemuan pada Desember 2012 menghasilkan kembali dibangunnya hubungan bilateral yang normal antara Pemerintah Myanmar dan Pemerintah Australia dalam bidang Pertahanan dan Militer dimasukkannya Myanmar ke dalam program kerja sama pertahanan DCP Australia dengan alokasi awal 172.000 AUD (Hills, 2017). Pembicaraan lanjutan kemudian terjadi pada 18 Maret 2013 bertempat di Canberra, Australia (Parliament of Australia, 2013). Pertemuan tersebut dihadiri oleh Presiden Myanmar saat itu, Thein Sein, dan Perdana Menteri Australia saat itu, Julia Gillard (Petersen, 2013). Pertemuan tersebut kemudian membahas mengenai pemulihan dan normalisasi hubungan Pemerintah Australia dan Pemerintah Myanmar. Pertemuan tersebut menyepakati bahwa Australia akan menyediakan 20 juta AUD tambahan selama dua tahun untuk fase pertama Kemitraan Reformasi Myanmar-Australia yang baru, diumumkan pencabutan terhadap beberapa pembatasan dalam keterlibatan pertahanan, keterlibatan Australia dalam mendorong pengembangan kekuatan pertahanan modern dan dukungan terhadap demokratisasi dan reformasi di Myanmar (Hills, 2017).

Pengesahan normalisasi hubungan militer dan pertahanan antara Pemerintah Australia dengan Pemerintah Myanmar ditandai dengan dimulainya kerja sama pertahanan dan militer antara kedua negara tersebut pada tahun 2013 dan pengurangan daftar sanksi dengan tetap mempertahankan Embargo senjata.

Tindakan tersebut kemudian disusul pada tahun 2014 penempatan kembali John Dudley selaku Kapten Angkatan Laut Australia pada posisi Atase Pertahanan yang telah kosong sejak tahun 1979, serta kunjungan Kapal Patroli *Armidale* *HMAS Childers* sejak terakhir kali kapal perang Australia mengunjungi Myanmar pada tahun 1959 (Hills, 2017). Melihat keberhasilan transisi yang dilakukan oleh Pemerintah Myanmar pada tahun 2015, Pemerintah Australia melihat perlunya melibatkan *Tatmadaw* dalam mendorong proses reformasi yang terjadi di Myanmar dengan memperkuat pasukan pertahanan Myanmar agar lebih profesional, dan menunjukkan pentingnya untuk patuh terhadap hukum humaniter internasional (Department of Defense, 2020). Pemerintah Australia pada tahun 2016 melalui Menteri Pertahanan Australia dengan persetujuan dari Menteri Luar Negeri dan Perdagangan kembali merevisi kebijakan pertahanan dan sepakat untuk memperluas kerja sama militer dan pertahanan dengan Pemerintah Myanmar di bidang-bidang non-tempur seperti; bantuan bencana, latihan pemeliharaan perdamaian, keamanan maritim dan keselamatan penerbangan, pelatihan Bahasa Inggris, kerja sama sipil-militer, pendidikan perwira dan kunjungan resmi, mensponsori kehadiran *Tatmadaw* di acara-acara bilateral dan multilateral (Elise, 2018).

Kerja sama militer dan pertahanan dengan Myanmar tidak terlepas dari Diplomasi Pertahanan yang dilakukan oleh Pemerintah Australia. Pembicaraan untuk kerja sama bilateral di bidang militer dan pertahanan dilakukan tanggal 21-22 Maret 2017 di Nay Pyi Taw, Myanmar, dan dipimpin oleh staf

Kementerian Pertahanan Australia (Department of Defense, 2020). Dana yang dialokasikan untuk kerja sama tersebut sebesar 398.000 AUD (Elise, 2018). Pertemuan tersebut kemudian menghasilkan adanya pembicaraan pertahanan tahunan dan ikatan pertahanan antara Pemerintah Australia dengan Pemerintah Myanmar (Parliament of Australia, 2018). Selain itu kedua negara juga menyepakati Kerja sama yang disetujui dalam pertemuan tersebut berfokus pada bantuan kemanusiaan, bantuan bencana dan latihan operasi perdamaian serta kursus-kursus seperti kursus bahasa Inggris yang merupakan bentuk keterlibatan Australia di bidang non-tempur (Department of Defense, 2020).

Departemen Pertahanan Australia mendanai pasukan Myanmar untuk melakukan pelatihan pemeliharaan gabungan yang disebut dengan *Pirab Jabiru* yang merupakan latihan gabungan antara Australia dengan Thailand yang dilakukan pada bulan Mei-Juni 2018 di Thailand (Armstrong, 2018). Latihan *Pirab Jabiru* sendiri merupakan latihan pemeliharaan perdamaian seperti pemberian pemahaman mengenai pemeliharaan perdamaian, pemberian pelatihan untuk melindungi masyarakat ketika terjadi perang dan pemberian pemahaman mengenai pentingnya untuk mematuhi hukum internasional (Thailand Embassy, 2020). Kerja sama pertahanan dan militer yang dilakukan oleh Pemerintah Australia dengan Pemerintah Myanmar menjadi efektif karena dapat membuka komunikasi secara langsung pasukan *Tatmadaw* ataupun pejabat senior militer Myanmar, serta memberikan pelatihan dan pembelajaran secara langsung mengenai pemeliharaan perdamaian

ketika terjadinya konflik atau perang untuk tidak menggunakan kekerasan dalam penyelesaiannya.

Selain itu juga, Pemerintah Australia mempertahankan latihan pemeliharaan perdamaian bersama yang diadakan oleh PBB (Department of Defense, 2020; Global New Light of Myanmar, 2019). Tujuan Pemerintah Australia tetap mempertahankan keterlibatannya dengan Departemen Pertahanan dan Militer Myanmar dalam bidang pemberian latihan gabungan dan latihan pemeliharaan perdamaian adalah untuk memungkinkan dan memberikan kesempatan bagi para pejabat pertahanan dan Militer Myanmar untuk belajar mengenai bagaimana proses untuk pemeliharaan perdamaian (The Republic of The Union of Myanmar, 2018). Kerja sama militer dan pertahanan Australia dengan Myanmar juga membahas terkait bantuan kemanusiaan. Pemerintah Myanmar setuju untuk mengizinkan Australia dengan tim Palang Merah dan juga tim investigasi mereka untuk masuk jika terjadi krisis ataupun konflik (Department of Defense, 2020). Pemerintah Australia telah mengeluarkan dana sebesar 83 juta AUD untuk program bantuan kemanusiaan untuk Myanmar dengan 29,2 juta AUD untuk program bantuan perdamaian pada tahun 2018-2019 (Department of Foreign Affairs and Trade, 2020). Selain itu, Pemerintah Australia juga tetap memberikan pelatihan Bahasa Inggris bagi pasukan Myanmar yang mulai dilakukan pada Juni 2018 (Elise, 2018). Ini merupakan keterlibatan Pemerintah Australia di bidang non-tempur dengan Pemerintah Myanmar (Taipei News, 2018). Pelatihan Bahasa Inggris yang diberikan Pemerintah Australia kepada Myanmar dilakukan

di Australia dan dimasukkan ke dalam *English Language Profiling System* (ADFELPS) yang bertujuan untuk memberikan pasukan Tatmadaw kesempatan untuk mengidentifikasi dan memilih petugas-petugas dengan tingkat Bahasa Inggris yang cakap dan memadai untuk dicalonkan pada tempat atau jabatan yang relevan (Australia Department of Defense, 2020).

Pemerintah Australia melakukan Diplomasi Pertahanan dengan Myanmar dalam bentuk kerja sama pertahanan dan militer sebagai upaya mencari resolusi konflik untuk menyelesaikan permasalahan kemanusiaan yang terjadi di negara tersebut secara damai dan cepat (Parliament of Australia, 2018). Diplomasi Pertahanan yang dilakukan oleh Pemerintah Australia bertujuan untuk membangun kepercayaan dengan Pemerintah Myanmar. Hal itu akan memudahkan Pemerintah Australia untuk dapat masuk dan berkomunikasi, serta memberikan saran secara langsung dengan petinggi atau pejabat senior pertahanan Myanmar terkait kondisi Etnis Rohingya. Selain itu, Diplomasi Pertahanan dalam bentuk kerja sama militer juga berperan penting mengubah pola pikir militer negara lain dalam menyelesaikan konflik (Cottey dan Forster, 2004), sama halnya dengan yang dilakukan oleh Pemerintah Australia. Diplomasi Pertahanan yang dilakukan oleh Pemerintah Australia yang bersifat non-koersif, yakni dalam bentuk kerja sama pertahanan dan militer dengan Myanmar, bertujuan untuk bernegosiasi secara langsung dan membujuk Pemerintah Myanmar untuk berhenti menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan konflik dan mencari jalan menuju resolusi konflik dengan Etnis Rohingya (Elise,

2018). Salah satu pertemuan dan komunikasi yang terbentuk terjadi pada Maret 2018 dan April 2018 antara Pemerintah Australia dengan Pemerintah Myanmar. Pertemuan tersebut menghadirkan perwakilan Australia dan Myanmar. Pada kedua pertemuan tersebut, Pemerintah Australia berhasil melakukan komunikasi mengenai krisis Rohingya sembari membahas mengenai kerja sama pertahanan antara kedua belah pihak (Parliament of Australia, 2018).

## 5. KESIMPULAN

Pemerintah Australia melakukan Diplomasi Pertahanan dengan tetap melanjutkan kerja sama pertahanan dan militer dengan Pemerintah Myanmar di bidang non-tempur. Hal itu karena Pemerintah Australia menganggap memutuskan hubungan dengan Pemerintah Myanmar tidak akan menjadi langkah yang efektif (Elise, 2018). Pemerintah Australia percaya bahwa dengan melanjutkan kerja sama pertahanan dan militer dengan Myanmar justru akan membuka dan memudahkan Pemerintah Australia untuk masuk dan melakukan komunikasi dengan Pemerintah Myanmar mengenai kondisi dari Etnis Rohingya (Cochrane, 2017). Pemerintah Australia juga mengungkapkan pentingnya melanjutkan dan mempertahankan ikatan pertahanan dan militer dengan Myanmar karena sektor tersebut masih memiliki peran khusus di politik Myanmar sehingga dapat membuka komunikasi (Parliament of Australia, 2018). Pemerintah Australia juga mempertimbangkan dan menahan diri untuk mengutuk dan mengecam Pemerintah Myanmar dan memojokkan Aung San Suu Kyi, karena

Pemerintah Australia melihat bahwa Aung San Suu Kyi harus menjadi bagian dari solusi atas konflik Rohingya di Negara Bagian Rakhine (Parliament of Australia, 2018).

Pemerintah Australia dalam hal ini melakukan Diplomasi Pertahanan dengan tetap melanjutkan kerja sama pertahanan dan militer dalam bidang non-tempur yakni dengan tetap memberikan pelatihan pemeliharaan perdamaian, memberikan bantuan kemanusiaan dan tetap memberikan pelatihan Bahasa Inggris kepada Pemerintah Myanmar. Selain itu, dengan tetap melakukan kerja sama pertahanan dan militer memungkinkan Pemerintah Australia untuk dapat berkomunikasi langsung dengan Pemerintah Myanmar terutama Menteri Pertahanan Myanmar terkait kasus Etnis Rohingya. Diplomasi Pertahanan dalam bentuk kerja sama pertahanan dan militer yang dilakukan Pemerintah Australia berupa pelatihan bersama, pelatihan pemeliharaan perdamaian, pemberian bantuan dana dalam bidang bantuan kemanusiaan dan pelatihan Bahasa Inggris. Berbagai pelatihan yang dilakukan diharapkan mampu membuat Pemerintah Myanmar menghentikan tindak pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan terhadap Etnis Rohingya di Negara Bagian Rakhine.

## DAFTAR PUSTAKA

Andrew Cottey & Anthony Forster (2004).

*Chapter 1: Strategic Engagement: Defence Diplomacy as a Means of Conflict Prevention.* The Adelphi Papers. 44:365, 15-30.

Andrew Cottey & Anthony Forster. (2004).

*Chapter 2: Promoting Democratic Civil-*

- Military Relations*. The Adelphi Papers. 44:365, 31-50.
- Drab, L. (2018). *Defense Diplomacy – An Important Tool For The Implementation Of Foreign Policy And Security Of The State*. Security and Defence Quarterly, 20(3), 57-71.
- Blake, Robin Michael. (2016). *Defence Diplomacy for Conflict Prevention : a Strategic Analysis of the South African Defence Review 2015*. Department of Political Science. University of Pretoria. Retrieved from <https://repository.up.ac.za/handle/2263/58472>
- Hill, Cameron. (2017). *Defence cooperation with Myanmar—Australia and other countries: a quick guide*. Foreign Affairs Defense and Security, Parliament of Australia.
- Homes, Catesby. (2019). *Myanmar charged with genocide of Rohingya Muslims: 5 essential reads*. Retrieved from <http://theconversation.com/myanmar-charged-with-genocide-of-rohingya-muslims-5-essential-reads-128742>
- Suastha, Riva. (2018). *Tim Pencari Fakta PBB: Militer Myanmar Bantai Rohingya*. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180827190514-106-325311/tim-pencari-fakta-pbb-militer-myanmar-bantai-rohingya>
- Human Rights Watch. *Rohingya Crisis*. Diakses pada <https://www.hrw.org/tag/rohingya-crisis>.
- BBC. (2017). *Siapa sebenarnya etnis Rohingya dan enam hal lain yang harus Anda ketahui*. Retrieved from <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-41149698>
- Chrichton, E. (2013, March). *The Rohingya crisis of June 2012: a survivor's testimony*. Diambil kembali dari Open Democracy : <https://www.opendemocracy.net/en/opensecurity/rohingya-crisis-of-june-2012-survivors-testimony/>
- CNN. (2017, 6 September ). *Rights groups accuse Myanmar of 'ethnic cleansing' in Rohingya crackdown*. Diambil kembali dari CNN : <https://edition.cnn.com/2017/09/14/asia/rohingya-amnesty-report/index.html>
- Defense, D. o. (2013, May 3). *Defense White Paper 2013*. Diambil kembali dari Department of Defense : <https://www.defence.gov.au/whitepaper/2013/>
- Defense, D. o. (2014, January 14 ). *HMAS Childers arrives in Burma*. Diambil kembali dari NAVY Daily : <https://news.navy.gov.au/en/Jan2014/Feature/796/HMAS-Childers-arrives-in-Burma.htm#.XoqcmYgzbIV>
- Defense, D. o. (2017). *Department of Defense* . Diambil kembali dari

[https://www.google.com/search?safe=strict&rlz=1C1GCEB\\_enID802ID](https://www.google.com/search?safe=strict&rlz=1C1GCEB_enID802ID)